

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2010-2019.**

***Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi (Strata 1) Pada Program Studi Manajemen
Universitas Negeri Padang***



OLEH :

TANTI MAIDAR FALUJAH

2017/17059209

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (PERIODE 2010-2019)**

Nama : Tanti Maidar Falujah

TM/NIM : 2017/ 17059209

Jurusan : Manajemen

Keahlian : Keuangan

Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2022

Disetujui oleh :

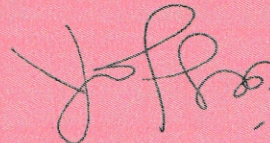
Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen



Perengki Susanto, SE, M. Sc, Ph.D
NIP. 19810404 200501 1 002

Pembimbing



Aimatul Yumna, SE, M. Fin, Ph. D
NIP. 19800404 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA (PERIODE 2010-2019)**

NAMA : TANTI MAIDAR FALUJAH
NIM/BP : 17059209/2017
JURUSAN : MANAJEMEN
KEAHLIAN : MANAJEMEN KEUANGAN
FAKULTAS : EKONOMI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Didepan Tim Penguji
Jurusan Manajemen (S1)
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2021

Nama

Tim Penguji

Tanda Tangan

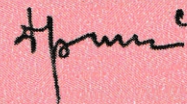
Aimatul Yumna, SE, M.Fin, Ph.D

Ketua



Abel Tasman, SE, MM.

Penguji



Dina Patrisia, SE, M.Si. AK, Ph.D

Penguji



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tanti Maidar Falujah
TM/NIM : 2017/17059209
Tempat/Tanggal Lahir : Kubang Nan Duo/ 16 November 1999
Jurusan : Manajemen
Keahlian : Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Kubang Nan Duo Sirukam, Kec. Payung Sekaki,
Kab.Solok 27387
No Hp : 082170273876 / 082197712682
Judul Skripsi : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di
Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada daftar kepustakaan.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, Februari 2022
Penulis



Tanti Maidar Falujah
NIM 17059209

ABSTRAK

Tanti Maidar Falujah, 17059209 : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Periode 2010-

Dosen Pembimbing : Aimatul Yumna, SE, M. Fin, Ph.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2019. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. Indikator-Indikator yang digunakan yaitu Dewan komisaris, Dewan direksi, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit sebagai variabel independen serta kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen yang di ukur menggunakan ROA dan ROE.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) mulai dari tahun 2010-2019 dengan metode *Purposive Sampling*. Sumber data dari penelitian ini adalah *annual report* tahunan perusahaan dan termasuk kedalam data sekunder serta menggunakan metode analisis yaitu analisis data regresi berganda.

Berdasarkan hasil dari uji t dan uji F, penelitian ini membuktikan bahwa variabel dewan komisaris, memiliki pengaruh terhadap ROA dan tidak memiliki pengaruh terhadap ROE. Variabel dewan direksi, kepemilikan institusional secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA dan ROE. Selanjutnya, hasil dari variabel komite audit menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE.

Keywords :Corporate Governance, ROA, ROE, Dewan Komisaris, dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Komite audit, *Leverage*, Ukuran perusahaan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2010-2019)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program Strata satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Selama proses penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen, serta kepada Ibu Yuki Fitria, SE, MM Selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Aimatul Yumna, SE, M.Fin, Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, memberikan saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku dosen pembimbing akademik yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Abel Tasman, SE. MM selaku dosen penguji 1 yang telah memberikan arahan, saran, masukan serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Dina Patrisia, SE, M.Fin, Ph.D selaku dosen penguji 2 yang telah memberikan, saran, arahan, masukan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Kepada seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Kepada kedua orang tua yang saya cintai dan saya sayangi, yaitu Bapak Elyusmardi dan Ibu Maidarnis yang telah memberikan dukungan penuh serta yang selalu memberi semangat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kepada seluruh pihak keluarga, kakak-kakak, adik-adik, serta semua saudara dan sahabat-sahabat saya Syafira Delviana, Velia Oktavia, dan Nofriza Febriwandi yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman yang telah memberi dukungan, bantuan, dan semangat khususya kepada Wulan Exrianissa dan Rendi Kurnia Illahi. Terimakasih

untuk setiap motivasi, semangat yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

11. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk dukungan serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Padang, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.	1
B. Identifikasi Masalah.	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah.	15
E. Tujuan Penelitian.	15
F. Manfaat Penelitian.	16
BAB 2	18
KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	18
A. Kajian Teori	18
1. Teori Agensi.....	18
2. <i>Stakeholder Theory</i>	20
B. Variabel Penelitian	21
1. Kinerja Perusahaan	21
2. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	26
3. Dewan Komisaris.....	33
4. Dewan Direksi	35

5. Kepemilikan Institusional	36
6. Komite Audit	37
7. Variabel Kontrol	39
C. Hubungan Antar Variabel	40
D. Penelitian Terdahulu	43
E. Kerangka Konseptual	47
F. Perumusan Hipotesis	49
BAB 3	52
METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian	52
B. Objek Penelitian	52
C. Populasi dan Sampel	52
1. Populasi	52
2. Sampel	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
1. Jenis Data	54
2. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	55
1. Variabel Terikat (Dependent Variable)	55
2. Variabel Bebas (Independent Variable)	56
3. Variabel Kontrol	57
G. Teknik Analisis Data	58
1. Analisis Deskriptif	58
2. Uji Asumsi Klasik	59
3. Analisis Regresi	63
4. Uji Kelayakan Model	64
BAB 4	67

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Gambaran Objek Penelitian	67
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	73
1. Kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA dan ROE.....	74
2. Dewan Komisaris	75
3. Dewan Direksi	76
4. Kepemilikan Institusional	76
5. Komite Audit	77
6. Leverage	77
7. Ukuran Perusahaan	78
C. Analisis Data	78
1. Uji Asumsi Klasik	78
2. Model Regresi Berganda	83
3. Uji Kelayakan Model.....	87
D. Pembahasan.....	94
BAB 5	102
KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 ROA.	4
Tabel 2 ROE.....	5
Tabel 3 Dewan Komisaris.....	8
Tabel 4 Dewan Direksi.....	9
Tabel 5 Kepemilikan Institusional	10
Tabel 6 Komite Audit.....	11
Tabel 7 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 8 Deskriptif Variabel.....	72
Tabel 9 Uji Kolmogrov-Smirnof.....	78
Tabel 10 Uji Multikolinearitas	79
Tabel 11 Analisis Regresi Berganda ROA.....	82
Tabel 12 Analisis Regresi Berganda ROE	84
Tabel 13 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	86
Tabel 14 Uji F	88
Tabel 15 Uji t	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.	48
Gambar 2 Grafik Scatter Plot ROA	80
Gammbar 3 Grafik Scatter Plot ROE.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel Penelitian.....	102
Lampiran 2 Hasil Olahan SPSS	109

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi di dalam perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri. Kepercayaan yang diberikan oleh investor kepada perusahaan dapat dikatakan sebagai ukuran kinerja perusahaan yang baik, karena dana yang di investasikan berada dalam keadaan aman. Setiawan (2005) mengemukakan bahwa kasus krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya pada pertengahan tahun 1997 diidentifikasi berkaitan dengan buruknya kinerja perusahaan, buruknya proteksi terhadap investor, dan lemahnya daya saing perusahaan tersebut.

Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya (Agoes, 2011). Untuk melindungi para pemegang saham dan investor maka diperlukan sistem *Corporate Governance* yang baik sehingga dapat membuat para investor dan kreditur yakin bahwa mereka akan memperoleh pengembalian yang baik terhadap dana yang sudah diinvestasikan. Nasution dan Setiawan (2007) menjelaskan bahwa *Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang ingin diajukan agar

dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasar kepada peraturan dari GCG. Jika tidak ada penerapan *Corporate Governance* fungsinya tidak berjalan dengan baik pada suatu perusahaan, maka ini dapat menurunkan kepercayaan investor dan menurunkan kinerja perusahaan

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ada penerapan *Corporate Governance* yang beragam antara satu negara dengan negara lain. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan dari sistem hukum yang melindungi hak investor antar negara (La Porta, 2000 dalam Sabrina, 2010). Untuk mengelola *Corporate Governance* yang baik diperlukan perusahaan yang sudah *go public* karena perusahaan yang sudah *go public* memiliki dana yang lebih besar dari hasil penjualan sahamnya kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2013 bahwa adanya permasalahan yang memperlihatkan adanya kelemahan dalam konteks kinerja dan *good corporate governance*. Kasus-kasus tersebut melibatkan Bank Mega, Bank Panin, Bank Jabar dan Banten (BJB), dan Bank Mestika Dharma. Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, DPR akan mengungkap empat kasus perbankan tersebut. Kasus pertama adalah Bank Mega-Elnusa. Bank mega bersalah secara perdata dalam kasus pembobolan dana deposito Elnusa sebesar Rp. 111 miliar. Kasus kedua adalah Bank BJB dimana terdapat kasus Koperasi Bina Usaha senilai Rp. 38 miliar. Kasus

Bank BJB kedua adalah adanya kredit macet PT Cipta Inti Parmindo (CIP) yang merugikan negara sebesar Rp. 55 miliar. Kasus ketiga adalah kasus Bank Panin, dengan dua kasus yaitu kasus pertama adalah akuisis saham oleh ANZ. ANZ berjanji untuk menjadi saham pengendali, tetapi sekarang malah akan divestasi. Sedangkan kasus kedua yaitu kasus direksi yang diselesaikan secara internal. Terakhir kasus keempat yaitu, Bank Mestika Dharma yang melakukan agunan ke suatu CV di Bandung dengan peminjaman kredit sebesar Rp. 1,2 miliar ke Bank Mestika. Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan Perbankan, Halim Alamsyah, mengatakan bahwa permasalahan ini disebabkan oleh lemahnya kinerja dan *good Corporate governance* pada perusahaan tersebut. Kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu terjadi pada Bank BNI pada tanggal 13 September 2021 terkait adanya pegawai Bank BNI yang menghilangkan deposito nasabah dengan tingkat kerugian sebesar Rp. 110 miliar.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari penghasilan bersih (laba) dan imbalan investasi yang bisa diketahui dengan rasio profitabilitas. ROA (*Return on asset*) dan ROE (*Return on equity*) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan persentase keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah asset. Dimana ROA akan mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola assetnya untuk menghasilkan laba selama satu periode sedangkan ROE akan mengukur seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba perusahaan bagi para pemegang saham, hal ini yang membuat ROA dan ROE menjadi salah satu faktor penting yang dilihat investor. Dengan

melihat tingkat ROA dan ROE maka dapat diukur kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan profit perusahaan, yang juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan para manajer untuk membuat keputusan.

Berikut disajikan data tabel komposisi ROA beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Tabel 1 Data Persentase ROA di Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI (%).

NAMA BANK	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Bukopin	1.39	1.38	0.09	0.22	0.13
Bank Negara Indonesia	2.60	2.70	2.70	2.80	2.40
Bank Rakyat Indonesia	4.19	3.84	3.69	3.68	3.50
Bank Jtrust Indonesia	-5.37	-5.02	0.75	-2.25	0.29
Bank Mandiri	3.15	1.95	2.72	3.17	3.03
Bank CIMB Niaga	0.47	1.09	0.70	1.05	1.99
Bank BTPN	3.10	3.10	2.10	2.10	3.10
Bank Victoria International	0.65	0.52	0.64	0.33	-0.09
Bank Mega	1.97	2.36	2.24	2.47	2.90
Bank Pan Indonesia	1.31	1.31	1.61	2.16	2.08

Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan diolah.

Tabel 1 diatas dapat dilihat perkembangan nilai ROA beberapa perusahaan perbankan dari tahun 2015-2019. Pada Tabel 1 terlihat bahwa nilai ROA cenderung berfluktuasi setiap tahunnya.

Mardiyanto (2009) menjelaskan bahwa ROE (*Return on equity*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang

saham atau nilai perusahaan. Sedangkan Tambunan (2007) menjelaskan bahwa ROE digunakan untuk mengukur *rate of return* (tingkat imbalan hasil ekuitas).

Berikut disajikan data ROE beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 2 Data Persentase ROE di Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (%).

NAMA BANK	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Bukopin	14.80	13.19	1.85	2.95	3.17
Bank Negara Indonesia	17.20	15.50	15.60	16.10	14.00
Bank Rakyat Indonesia	29.89	23.08	20.03	20.49	19.41
Bank Jtrust Indonesia	-59.63	-65.76	8.09	-29.13	4.24
Bank Mandiri	23.03	11.12	14.53	16.23	15.08
Bank CIMB Niaga	7.33	6.06	6.21	5.74	5.34
Bank BTPN	14.10	12.60	8.20	12.40	12.60
Bank Victoria International	6.73	4.79	5.52	3.41	-0.57
Bank Mega	15.30	10.91	11.66	13.76	14.85
Bank Pan Indonesia	6.07	8.29	7.49	9.23	9.90

Sumber : Laporan Tahunan Perusahaan diolah.

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat dilihat perkembangan nilai ROE beberapa perusahaan perbankan dari tahun 2015-2019. Pada Tabel 2 terlihat bahwa nilai ROE cenderung berfluktuasi setiap tahunnya.

Keberlangsungan perusahaan ditandai dengan peningkatan nilai perusahaan yang tercermin dalam pencapaian laba yang ditargetkan. Melalui laba tersebut, perusahaan mampu meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah adanya masalah kepentingan antara manajemen dan investor yang disebut dengan masalah agensi. Masalah agensi

merupakan salah satu masalah yang sering terjadi disebuah perusahaan, yang disebabkan oleh kepentingan yang berbeda-beda antara pihak pemegang saham selaku orang yang memiliki perusahaan dengan pihak manajemen selaku agen yang mengatur perusahaan. Perbedaan kepentingan ini akan memunculkan potensi konflik keagenan didalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam hal ini perusahaan perlu untuk menciptakan kepercayaan pada investor bahwa dana ekstern telah dipergunakan secara efektif dan efisien dengan memberikan kepastian bahwa manajemen telah berbuat yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Maka dari itu, dibutuhkan perlindungan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan.

Untuk memaksimalkan kesejahteraan dari para pemegang saham, manajer perusahaan juga ikut andil dalam hal ini, yang dapat menimbulkan permasalahan yang disebut dengan masalah keagenan. Jensen dan Meekling (1976) memberi penjelasan bahwa kepemilikan institusional dan manajerial adalah dua mekanisme *Corporate Governance* utama yang dapat dipergunakan untuk membantu pengendalian konflik keagenan.

Penelitian sebelumnya yaitu penelitian oleh Herawaty (2008) yang telah melakukan penelitian tentang hubungan *Corporate Governance* sebagai variabel moderasi terhadap nilai perusahaan yang menngunakan variabel kepemilikan institusional dan komisarisi independen dengan hasil yang menunjukkan *Corporate*

Governance berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi akan menurunkan nilai perusahaan. Sementara itu kualitas audit dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Bagi Bank Umum, Bank wajib melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan *good corporate governance* yang sesuai dengan periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank, yaitu setidaknya setiap semester akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember (Surat Edaran Bank Indoensia No.15/15/DPNP, 29 April 2013. Berdasarkan surat edaran tersebut maka yang termasuk kedalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi Komite dan Satuan kerja pada Bank tersebut. Bersumber dari Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJKK.05/2017 tentang penerapan tata kelola bagi Bank umum, yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berpijak pada prinsip Tata kelola Yang baik sebagai mana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya yaitu peraturan nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola Bank Umum.

Pengukuran *Corporate Governance* pertama yang digunakan yaitu ukuran Dewan Komisaris. Negara Indonesia menganut sistem *two-tie*, yaitu peran dewan komisaris dan dewan direksi dipisah secara jelas. Dewan komisaris akan mengawasi kerja

dewan direksi. Dilihat dari perspektif lembaga, bisa dikatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan direksi yang lebih besar lebih mungkin untuk waspada dalam masalah keagenan, karena lebih banyak orang yang akan meninjau tindakan manajemen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al (2001) menunjukkan hasil bahwa total dewan yang semakin besar maka proses pemantauan manajemen perusahaan akan semakin baik. Sehingga semakin besar ukuran total dewan komisaris, semakin baik juga kinerja keuangan perusahaan.

Berikut disajikan data dewan komisaris beberapa perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 3 Data Dewan Komisaris Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (%).

NAMA BANK	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Bukopin	6	7	7	8	8
Bank Negara Indonesia	8	8	8	9	8
Bank Rakyat Indonesia	7	9	9	8	8
Bank Jtrust Indonesia	4	6	6	4	4
Bank Mandiri	8	8	8	8	8
Bank CIMB Niaga	8	4	4	5	5
Bank BTPN	6	5	5	4	5
Bank Victoria International	4	4	4	3	3
Bank Mega	4	4	5	5	5
Bank Pan Indonesia	6	6	6	4	5

Sumber : Laporan Tahunan diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI mengalami fluktuasi.

Berikut juga akan disajikan data dewan direksi perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI.

Tabel 4 Data Dewan Direksi Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI (orang).

NAMA BANK	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Bukopin	7	7	7	7	8
Bank Negara Indonesia	9	10	10	11	11
Bank Rakyat Indonesia	11	11	11	12	12
Bank Jtrust Indonesia	3	7	7	4	5
Bank Mandiri	10	10	10	11	11
Bank CIMB Niaga	11	5	5	5	11
Bank BTPN	11	7	7	7	9
Bank Victoria International	7	7	7	7	9
Bank Mega	10	8	7	8	7
Bank Pan Indonesia	6	11	11	11	11

Sumber : Laporan Tahunan diolah.

Pada Tabel 4 juga memperlihatkan bahwa jumlah dewan direksi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 juga mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan Tabel 1 dan 2 fluktuasi antara dewan komisaris dan dewan direksi juga diikuti dengan fluktuasi ROA dan ROE perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2019. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah dewan komisaris dan dewan direksi mempengaruhi ROA dan ROE.

Azeez (2015) serta Ali dan Nasir (2014) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan direksi (*Board Size*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian Guoa dan KGA

Kumara (2012) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja perusahaan.

Selanjutnya pengukuran *Corporate Governance* adalah adanya kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun kepemilikan lembaga dan perusahaan lain (Juniarti dan Sentosa, 2009). Adanya kepemilikan institusional oleh perusahaan menjadi hal penting untuk memantau manajemen perusahaan agar mendorong pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja dan dapat meningkatkan kinerja.

Berkut ini disajikan data kepemilikan Institusional perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Tabel 5 Data Kepemilikan Institusional Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI (%).

NAMA BANK	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Bukopin	60	60	60	62	64
Bank Negara Indonesia	60	60	60	60	60
Bank Rakyat Indonesia	66	65	64	64	65
Bank Jtrust Indonesia	98	98	97	98	92
Bank Mandiri	70	68	67	69	60
Bank CIMB Niaga	97	92	94	92	91
Bank BTPN	68	68	60	60	60
Bank Victoria International	69	69	71	64	77
Bank Mega	58	58	58	58	58
Bank Pan Indonesia	77	57	85	85	94

Sumber : Laporan Tahunan diolah.

Berdasarkan Tabel 5 dapat kita lihat persentase kepemilikan perusahaan oleh institusional pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tabel 1 dan 2 mengenai ROA dan ROE, setiap perusahaan mengalami fluktuasi yang diikuti dengan fluktuasi kepemilikan institusional perusahaan,

Penelitian sebelumnya oleh Brickley et al., (1998) dalam Kartikawati (2009) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Mollah, Farooque, dan Karim (2010) justru menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan ROE.

Variabel selanjutnya yaitu Komite Audit yang juga memegang peran cukup penting dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Adanya komite audit yang efektif menjadi salah satu aspek penilaian dalam penerapan GCG Agar terwujudnya prinsip-prinsip GCG di dalam perusahaan.

Berikut disajikan data jumlah Komite Audit perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 6 Data Komite Audit Beberapa Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI.

NAMA BANK	2015	2016	2017	2018	2019
Bank Bukopin	2	3	3	3	3
Bank Negara Indonesia	2	3	3	3	3
Bank Rakyat Indonesia	3	3	3	3	3
Bank Jtrust Indonesia	3	3	3	3	3
Bank Mandiri	3	3	3	4	4

Bank CIMB Niaga	3	3	3	3	4
Bank BTPN	3	3	3	3	5
Bank Victoria International	5	5	5	5	3
Bank Mega	3	3	3	3	3
Bank Pan Indonesia	4	5	4	5	3

Sumber : Laporan Tahunan diolah.

Pada Tabel 6 terlihat bahwa jumlah dari komite audit perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019. Jika dilihat pada tabel 1 dan 2 Fluktuasi ROA dan ROE juga diikuti dengan kecenderungan fluktuasi dari jumlah komite audit tiap-tiap perusahaan.

Turley dan Zaman melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* dan komite audit, dengan evaluasi dan sintesa beberapa penelitian terdahulu mengenai *corporate governance* yang memiliki kaitan dengan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara keberadaan komite audit dengan nilai laporan keuangan dan kinerja.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dimana pada penelitian terdahulu menggunakan berbagai variabel yang menyangkut *Corporate governance*, seperti penelitian yang dilakukan oleh Gurbuz et al (2010) yang meneliti dampak *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan di Turki, dengan mengikut sertakan kepemilikan institusional didalamnya. Selanjutnya, yaitu penelitian oleh Gurlaiz Shahid (2014) dengan variabel *board size*, *boar independance*, dan

managerial ownershi. Serta ROA, ROE dan Tobins'Q sebagai proksi dari kinerja perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan sebagai objek penelitian, dan menggunakan ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variabel dari *corporate governance*. Dengan menggunakan ROA dan ROE sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Digunakannya perusahaan perbankan sebagai objek dari penelitian ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatannya, bank senantiasa berupaya menerapkan dan memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (Peraturan BI No. 8/4/PBI/2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas PBI No. 4/14/PBI/2006).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penggunaan variabel bebas dalam penelitian ini, penelitian ini menggabungkan 4 indikator dari *corporate governance* yaitu dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional dan komite audit. Kedua, keterbaruan dari periode penelitian ini. Ketiga, penggunaan dua variabel terikat yaitu ROA dan ROE, pada penelitian terdahulu ada penelitian yang hanya menggunakan satu variabel terikat saja yaitu ROA atau ROE, sedangkan pada penelitian ini penulis mencoba untuk menggabungkan kedua rasio tersebut. ROA digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat pengembalian terhadap total asset untuk pihak internal, sedangkan ROE

digunakan untuk melihat sejauh mana tingkat pengembalian terhadap equitas untuk pihak eksternal.

Berdasarkan latar belakang diatas dan berdasarkan penelitian sebelumnya penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan *corporate governance* dengan indikator dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit yang berkaitan dengan kinerja dengan mengambil judul **“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PADA PERIODE 2010-2019”**

B. Identifikasi Masalah.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. ROA dan ROE beberapa perusahaan berfluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Adanya fluktuasi antara ukuran dewan komisaris beberapa perusahaan yang diikuti dengan fluktuasi ROA dan ROE.
3. Adanya fluktuasi antara ukuran dewan direksi beberapa perusahaan yang diikuti dengan fluktuasi ROA dan ROE.
4. Adanya fluktuasi antara kepemilikan institusional beberapa perusahaan yang diikuti oleh fluktuasi ROA dan ROE.

5. Adanya fluktuasi antara komite audit beberapa perusahaan yang diikuti oleh fluktuasi ROA dan ROE.

C. Batasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi penelitian pada pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2019.

D. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan ?
2. Bagaimana pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan ?
3. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan ?
4. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan ?

E. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui pengaruh dari Dewan Komisaris terhadap ROA dan ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari Dewan Direksi terhadap ROA dan ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap ROA dan ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap ROA dan ROE pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

F. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan
 Sebagai masukan dan inspeksi bagi pimpinan perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan dan bisa memanfaatkan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan.
2. Bagi investor
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan guna membuat keputusan investasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 Dapat memperbanyak pengetahuan, pemahaman dan wawasan mengenai *Good Corporate Governance*, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance dalam aktivitas perusahaan dan mengenai segala permasalahan dan penyelesaiannya.

BAB 2

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

Berdasarkan uraian latar belakang maka teori yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Agensi

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan Meckling menjelaskan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak dengan pemegang saham (principal) dan manajemen perusahaan (agent) yang mengelola perusahaan, dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan. Jensen dan Meckling (1976) juga menjelaskan bahwa jika dua kelompok (agent dan principal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk agent tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan principal.

Menurut Scott (2000) menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak kontrak, seperti kontrak antara para pekerja dengan manajer mereka dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan kreditur. Kontrak kerja yang dimaksud adalah kontrak kerja antara pemilik modal dan manajer perusahaan, dimana agen dan klien berusaha memaksimalkan kegunaan informasi yang tersedia bagi mereka.

Pihak *agent* menguasai fakta secara aporisma (*full information*) dan di lain pihak *principal* memiliki keunggulan kekuasaan (*discretionary power*) atau kekuasaan yang maksimal, sehingga kedua belah pihak ini memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*) dalam setiap keputusan yang dibuat. Dalam kondisi seperti itu, manajemen berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menawarkan kepada para pemegang saham, khususnya agen perusahaan, jika pihak manajemen perusahaan tidak mampu menawarkan kinerja dalam bentuk keuntungan maksimal kepada pemegang saham, maka hal ini memungkinkan pihak komisaris untuk mengganti struktur organisasi manajemen (Fahmi, 2015).

Sulistyanto (2014:131) menjelaskan permasalahan keagenan (*agency problem*) dalam manajemen bisnis sebagai wewenang dan kebijaksanaan *agent* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, sehingga terjadi proses memaksimalkan kepentingan pribadi dengan biaya yang harus ditanggung oleh pemberi kerja. *Agent* yang seharusnya bekerja untuk meningkatkan kepentingan dan kesejahteraan pemilik perusahaan sebenarnya bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi mereka. Upaya peningkatan nilai perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja *agent* yang sebenarnya, namun telah dirancang dengan sedemikian rupa untuk menjadi lebih baik sesuai keinginan *agent*. Apabila ada penetapan penghargaan untuk *agent* berdasarkan kinerja yang diperolehnya maka *agent* akan mendapatkan gaji serta bonus yang lebih tinggi dibandingkan penghargaan yang sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, manajemen laba didasari oleh adanya *agency theory* yang memperlihatkan bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. konsep *agency theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan *principal*.

2. Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* pertama kali digagas oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa teori *stakeholder* adalah teori mengenai organisasional manajemen dan etika bisnis yang membahas moral dan nilai dalam mengatur organisasi. R.Edward Freeman menyatakan dalam teori *stakeholder* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beropreasi untuk kepentingan sendiri namun juga harus mampu memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. Denga demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan terebut. Asumsi teori *stakeholder* dibangun atas dasar pernyataan bahwa perusahaan berkembang menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat sangat terkait dan memerhatikan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menunjukkan akuntabilitas maupun responsibilitas secara lebih luas dan tidak terbatas hanya kepada pemegang saham.

Pemegang saham mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* memiliki hak terhadap perusahaan. *Stakeholder* dapat mengendalikan atau mempunyai kemampuan (*power*) untuk

mempengaruhi pemakaian sumber ekonomi yang dipergunakan perusahaan. Oleh sebab itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar atau kecilnya *power* yang dimiliki *stakeholder* (Ghozali dan Cahiriri, 2007). *Power* tadi bisa berupa pemakaian sumber-sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga

kerja), akses media yang berpengaruh, kemampuan mengatur perusahaan, atau kemampuan mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali dan Chairiri 2007 dalam Deegan, 2000).

Keberhasilan usaha suatu perusahaan ditentukan oleh manajemen perusahaan yang berhasil dalam membina hubungan antara perusahaan dengan para *stakeholder*. Berdasarkan *stakeholder theory*, kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung ada kemampuannya menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Jika mampu, maka perusahaan akan meraih dukungan yang berkelanjutan dan menikmati pertumbuhan pangsa pasar, penjualan, serta laba. Murzully dan Denies (2012) menjelaskan bahwa *stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab dan akuntabilitas.

B. Variabel Penelitian

1. Kinerja Perusahaan

a. Definisi Kinerja Perusahaan

Pada kamus istilah akuntansi kinerja (*perfomance*) adalah evaluasi kecukupan dalam aktivitas perusahaan selama beberapa waktu. Menurut Husein Umar (2002) kinerja adalah istilah keseluruhan yang digunakan untuk beberapa atau kegiatan secara umum yang dipergunakan untuk sebagian maupun keseluruhan tindakan aktivitas selama waktu dengan acuan pada total standar seperti biaya masa lalu, dasar efisiensi, pertanggung jawaban, dan akuntabilitas manajemen.

Berdasarkan Hastuti (2005) dalam Yudha (2007), kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual secara terus menerus yang dibuat oleh manajemen. Kinerja perusahaan secara keseluruhan adalah gambaran prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam kegiatannya. Kinerja perusahaan adalah gambaran keadaan perusahaan selama periode waktu tertentu, hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki (Husein Umar, 2002).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kinerja perusahaan merupakan suatu aktivitas perusahaan secara utuh pada suatu periode tertentu yang menggambarkan suatu hasil atau prestasi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, kinerja perusahaan ini dapat diperkirakan dengan menganalisis dan menilai laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan sering digunakan sebagai alasan untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan. Kinerja keuangan

perusahaan juga menggambarkan keadaan keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, baik yang mencakup aspek peningkatan aset maupun pengeluaran dana.

a. Pengukuran Kinerja

Ardhy Pratiwi Setiowati (2009) menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan secara umum dapat dilihat dari dua ukuran yaitu :

1) *Market-based measure*

Jones (Ardhy Pratiwi Setiowati, 2009) menyatakan bahwa *return* dari sebuah saham merupakan salah satu tolak ukur kinerja saham sehingga para investor selalu berusaha memaksimalkan tingkat *return* yang akan dihasilkan setelah memperhitungkan faktor risiko. *Return* juga merupakan hasil ataupun keuntungan yang didapat dari proses investasi yang digunakan untuk memotivasi investor dalam berinvestasi.

2) *Accounting-based measure*

Dalam mengukur kinerja perusahaan, banyak analisis yang dilakukan oleh beberapa peneliti dalam penelitiannya. Kinerja keuangan sering diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan selama periode tertentu, rasio yang bisa digunakan yaitu rasio profitabilitas. Menurut Venktraman (1986) dalam Fitri(2008), ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan yaitu, kinerja keuangan dan kinerja operasional, dimana untuk

pengukuran kinerja keuangan terbagi lagi menjadi dua pengukuran yaitu pengukuran berbasis akuntansi (*Accounting-based measure*) serta pengukuran berbasis pasar (*Market-based measure*). Alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan berbasis akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penjualan
2. Profitabilitas
3. Imbal hasil aset (ROA)
4. Imbal hasil ekuitas (ROE)
5. Laba per saham (EPS)

Kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dibuat oleh organisasi dalam waktu tertentu mengenai standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan harus menjadi hasil yang dapat diperkirakan dan digambarkan sesuai dengan keadaan empiris suatu perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Untuk mengetahui tingkat kinerja perusahaan dilakukan kegiatan evaluasi terhadap hasil usaha yang dilakukan selama waktu tertentu kemudian hasil tersebut dapat berupa barang atau jasa yang menjadi karakter dari keberhasilan kerja perusahaan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan

Dalam penerapannya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan ditentukan oleh tingkat realitas perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG (*Indonesian Institute of Corporate Governance*) telah melaksanakan *good corporate governance* dengan baik dan secara langsung meningkatkan nilai sahamnya. Semakin tinggi perusahaan menerapkan *corporate governance* yang diukur menggunakan *corporate governance index perception* maka semakin tinggi juga tingkat kedisiplinan perusahaan dalam menciptakan kinerja perusahaan yang baik pula.

Secara teoritis penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan pilihan yang ideal, sebagian besar *good corporate governance* dapat memperluas rasa percaya investor untuk menanamkan modal mereka yang berdampak pada kinerjanya.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh tata kelola terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Black, et al. (2003), Siallagan & Machfoedz (2006), Mitton (2002), dan Febriyana (2007), menemukan bahwa tata kelola perusahaan memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan. Sementara Gompers, dkk. (2003) menemukan hubungan positif antara indeks tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan

jangka panjang. Khomsiyah (2005) melakukan pengujian simultanitas penerapan *corporate governance* dan kinerja perusahaan, menyimpulkan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan. Sedangkan Wardani (2008) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan.

2. Good Corporate Governance (GCG)

a. Definisi Good Corporate Governance

Seperti yang ditunjukkan oleh Forum Tata Kelola Indonesia, makna *corporate governance* adalah sekelompok keputusan yang mengatur hubungan antara investor, dewan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta kepentingan internal dan eksternal lainnya mengenai kebebasan dan komitmen mereka, atau dalam arti lain *corporate governance* adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan dan mengendalikan perusahaan. Bank dunia (*World Bank*) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Davis (2006:6) berdasarkan *Cadbury Report* mengeluarkan definisi tersendiri tentang GCG, GCG diartikan sebagai prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan. Sedangkan menurut Monks dan Minow (2001), *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan.

Good corporate governance (GCG) adalah sekelompok koneksi antara manajemen perusahaan, dewan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004). GCG pada dasarnya berkaitan dengan cara pemegang kepentingan (*stakeholder*) berusaha untuk menjamin para manajer dan karyawan internal lainnya secara konsisten membuat langkah yang sesuai atau merangkul instrumen yang mengamankan kepentingan *stakeholder* (Al-Haddad, Alzurqan, & Al-Sufy, 2011). Kemudian GCG juga menetapkan bagaimana investor dan pemangku kepentingan, manajemen, dan dewan direksi melakukan interaksi dalam memutuskan kinerja perusahaan (Al-Haddad, Alzurqan, & Al-Sufy, 2011). Motivasi utama dibalik GCG adalah membuat pengaturan pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan aset perusahaan dan tetap memberikan dorongan terjadinya pertumbuhan perusahaan dan tetap mendukung pengembangan perusahaan (Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B, 2013). GCG yang

layak harus memberikan dorongan yang tepat bagi dewan dan manajemen untuk mencapai target bagi kepentingan perusahaan dan investor serta memberikan fasilitas pengawasan yang efektif (OECD, 2004).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat didorong dari berbagai, khususnya moral dan pedoman. Dorongan moral berasal dari perhatian individu pelaku bisnis dalam menjalankan pendekatan strategis yang berfokus pada daya tahan perusahaan, kepentingan investor, dan menjauh dari cara-cara untuk membuat manfaat sesaat. Sedangkan dorongan dari pedoman (*regulatory driven*) memberdayakan perusahaan untuk mengikuti terhadap aturan dan pedoman yang diterapkan pada setiap bagian perusahaan. GCG harus diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan. Standar GCG adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sangat dibutuhkan untuk mencapai kelangsungan usaha (*sustainability*) dengan memperhatikan para pemegang kepentingan atau *stakeholder*, (Komite Nasional Kebijakan *Governance*/KNKG:2006).

b. Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), prinsip dari GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan sangatlah penting untuk mencapai pengelolaan

perusahaan yang disertai dengan pemahaman ketertarikan pada *stakeholder*, prinsip tersebut adalah :

1) Transparansi (*Transparancy*)

Perusahaan harus memberikan data yang signifikan dan tersedia secara efektif dan dapat dipahami oleh *stakeholders* dengan mengungkapkan masalah yang diidentifikasi dengan hukum, namun juga data lain yang dianggap penting bagi *shareholders*, kreditur, dan *stakeholders* untuk mengambil suatu keputusan.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan perlu mempertanggung jawabkan kinerjanya secara terbuka dan wajar. Selanjutnya, perusahaan harus diawasi dengan cara yang benar dan terukur, dan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Akuntabilitas sangat penting untuk mencapai kinerja perusahaan yang memiliki kelanjutan.

3) Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus menyetujui hukum dan menyelesaikan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan dengan tujuan akhir mengikuti pemeliharaan bisnis dalam jangka panjang dan dianggap sebagai penduduk perusahaan yang baik atau *Good Corporate Citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Dalam pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus diawasi secara bebas dengan pengaruh keseluruhan yang tepat, sehingga tidak ada organ perusahaan yang akan mendominasi organ lainnya dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

5) Keadilan (*Fairness*)

Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus secara konsisten mempertimbangkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* lainnya berdasarkan prinsip keadilan.

c. Manfaat *Corporate Governance*

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan pelaksanaan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau pengecekan pelaksanaan kinerja manajemen dan adanya tanggung jawab manajemen terhadap *shareholder* dan pemegang kepentingan lainnya, mengingat struktur, prinsip, dan pedoman yang relevan (Tri Gunarsih, 2003). Selain itu tata kelola perusahaan juga memiliki manfaat, terutama sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui proses pemilihan keputusan yang baik, mengembangkan kemampuan fungsional perusahaan

dengan lebih baik, dan lebih mengembangkan layanan kepada *stakeholders*.

- 2) Mempermudah pengamanan pembiayaan yang lebih murah dengan tujuan dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- 3) Mengurangi biaya keagenan, yaitu biaya yang harus dibiayai oleh investor karena penunjukan kekuasaan kepada pihak manajemen.
- 4) Meningkatkan nilai saham perusahaan untuk bekerja meningkatkan citra perusahaan kepada publik secara lebih komprehensif dan dalam jangka panjang.
- 5) Meningkatkan kepastian investor untuk memasukkan modalnya di Indonesia. meningkatnya kepercayaan investor kepada perusahaan dapat diperluas didalam perusahaan untuk mengakses tambahan aset yang dibutuhkan untuk keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan perusahaan yang berbeda terutama untuk tujuan jangka panjang. Hasil pengujian yang dilakukan Mckinsey & Company (2002) menunjukkan bahwa lebih dari 70% pendukung keuangan institusional yang bersedia membayar lebih (hingga 26-30% lebih mahal) saham perusahaan yang menjalankan *corporate governance* dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya kurang baik.
- 6) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan

keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku serta penyajian informasi secara transparan. Hasil penelitian Beasley et al, (1996) dan Abbott et al, (2000) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

d. Mekanisme *Corporate Governance*

Johnson et al., (2000) memberikan bukti bahwa rendahnya kualitas *corporate governance* dalam suatu negara berdampak negatif pada pasar saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan pada masa krisis di Asia. Selain itu Johnson juga mendefinisikan *corporate governance* sebagai keefektifan mekanisme yang bertujuan meminimisasi *agency conflict*.

Beasley (1996) menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan *good corporate governance* umumnya meningkat kinerja. Rafik (2002) menunjukkan bahwa investor di negara maju bersedia memberi premium yang benar-benar tinggi, sekitar 28% untuk perusahaan yang menerapkan standar *corporate governance* secara konsisten. Selain itu, ada dua sistem *corporate governance* yaitu :

1) Mekanisme pengendalian internal perusahaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme internal ini adalah *agent* dan *principal* yang terdiri dari *board of directors* dan *executive* manajer

didalam perusahaan. *Board directors* atau dewan direksi memiliki kewenangan untuk memperkerjakan, memberhentikan, mengawasi dan memberikan kompensasi kepada *top-level decision manager* atau para manajer puncak. Sementara manajemen adalah pihak eksekutif yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional perusahaan (manajer).

2) Mekanisme pengendalian eksternal perusahaan

Struktur mekanisme pengendalian eksternal terdiri dari *stakeholder* yang berkepentingan dan berhubungan dengan perusahaan diantaranya Pasar Modal, Pasar Uang, dan Auditor. Struktur mekanisme pengendalian eksternal merupakan pengendalian yang dibentuk pihak dari luar perusahaan. Mekanisme ini disebut juga dengan mekanisme pengendalian pasar karena mekanisme ini terbentuk oleh hubungan perusahaan dengan pasar, sehingga pengendalian perusahaan dilakukan oleh pasar sendiri.

3. Dewan Komisaris

Sesuai Forum Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI, 2002) ada dua jenis kerangka dewan dalam perusahaan yaitu *one tier system* (sistem satu tingkat) dan *two tier system* (sistem dua tingkat). Kerangka kerja satu tingkat artinya perusahaan hanya menyiratkan bahwa sebuah perusahaan hanya memiliki satu dewan, pada umumnya campuran antara manajer dan pengurus

senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Kerangka kerja ini biasanya diklaim oleh negara yang merupakan kerangka kerja Anglo Saxon, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Sementara itu kerangka kerja dua tingkat mempunyai dua badan yang terpisah untuk menjadi dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan komisaris dipercaya untuk mengelola kewajiban manajemen sementara dewan direksi dipercayakan untuk mengawasi dan menangani perusahaan dibawah kepemimpinan dan pengawasan dewan komisaris. FCGI (2002) menyatakan bahwa Indonesia berpegang pada sistem dua tingkat mengingat fakta bahwa seperangkat untuk hukum di Indonesia yang berasal dari Belanda.

Sebagai mana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas”, Dewan Komisaris adalah organ organisasi yang dipercayakan mengawas baik secara umum atau khusus sesuai pasal-pasal serta mendidik dewan direksi. Dewan Komisaris memiliki beberapa kapasitas, antara lain, sebagai pekerjaan bantuan yang menyiratkan bahwa dewan komisaris memberikan konferensi dan nasihat kepada para manajemen. Sebagai elemen kontrol yang menyiratkan bahwa dewan komisaris membahas sistem internal untuk mengendalikan perilaku oportunistik manajemen untuk membantu menyesuaikan kepentingan investor dan manager (FCGI, 2002). Kekurangan jumlah dewan diidentifikasi dengan masalah korespondensi dan

koordinasi dengan perkembangan jumlah dewan dan penurunan kapasitas dewan untuk mengendalikan manajemen sehingga menyebabkan masalah keagenan dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Ciucu dan Dragoescul, 2014). Kehadiran dewan komisaris membuat perusahaan lebih bergantung pada dewannya untuk memiliki pilihan menangani sumber dayanya sehingga dapat mempengaruhi profit perusahaan.

4. Dewan Direksi

Menurut Mizruchi (1983) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Pfeffer dan Salancik, dalam Bugshan (2005) menjelaskan bahwa dengan semakin besar kebutuhan akan menghubungkan eksternal yang efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sementara itu jumlah dewan yang besar diidentivikasi dengan dua hal khususnya, peningkatan masalah dalam komunikasi, koordinasi, dan berkurangnya kapasitas dewan untuk mengendalikan manajemen yang menyebabkan masalah keagenan muncul dari partisi antara manajemen dan kontrol. Di Indonesia pedoman tentang

direktur/direksi tertuang dalam UU. No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menerangkan fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab direksi. Pada umumnya dewan direksi memiliki kewajiban di antaranya :

- a) Memimpin organisasi dengan mendistribusikan pendekatan organisasi.
- b) Pilih, tetapkan, awasi kewajiban pekerja dan kepala bagian (manajer).
- c) Menyetujui rencana pengeluaran tahunan perusahaan.
- d) Mengirim laporan kepada investor atas kinerja perusahaan.

5. Kepemilikan Institusional

Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranto (2013), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga dari eksternal. Menurut Wahyu Widarjo (2010) kepemilikan institusional adalah kondisi dimana perusahaan memiliki saham dalam suatu organisasi. Institusi semacam itu dapat berupa institusi pemerintah, swasta, domestik atau asing. Kepemilikan institusional diperkirakan oleh tingkat persentase saham yang dipegang oleh institusi yang terisolasi oleh jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional merupakan persentase hak yang dipegang oleh institusi (Beiner et al., 2003).

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer, hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang

strategis bagi perusahaan (Jensen, M.C, dan Meckling, W.H, 1976). Cornet et al., (2006) menganggap bahwa langkah-langkah pengawasan perusahaan oleh pihak institusional dapat mendesak manajer untuk lebih berkonsentrasi pada presentasi kinerja perusahaan untuk mengurangi perilaku *opportunistic* atau melayani diri sendiri. Mitra (2002), dan Pratana dan Mas'ud (2003) juga mengamati bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer dalam mengelola profit.

6. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendeskripsikan bahwa komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan bebas yang dibentuk oleh dewan komisaris, oleh karena itu, tugasnya adalah untuk membantu dan memperkuat kapasitas dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menyelesaikan fungsi pengawasan (*oversight*) terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari tata kelola perusahaan. Komite audit memegang peran yang cukup penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Kehadiran komite audit yang efektif adalah salah satu bentuk penilaian dalam penerapan GCG.

Mengingat Kep-315/BEJ/06200 komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang tercatat. Komite audit diterima dan ditolak oleh dewan komisaris perusahaan yang tercatat. Kewajiban dan tanggung jawab komite audit yaitu

melakukan memeriksa dan meneliti pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Secara umum Forum Tata Kelola Perusahaan (FCGI, 2001) memberi penjelasan bahwa, komite audit memiliki tanggung jawab dalam tiga bidang yaitu, laporan keuangan, tata kelola perusahaan, serta pengawasan perusahaan.

Menurut Fleming et. Al., (2002) memberi penjelasan bahwa untuk meningkatkan efektivitas komite audit dalam menjalankan tugasnya, anggota komite audit harus independen. Untuk meningkatkan pengawasan, menjaga kredibilitas laporan keuangan, akuntansi atau keuangan yang menjadi suatu keharusan bagi anggota komite audit. Meskipun anggota komite audit independen serta memiliki pendidikan akuntansi dan keuangan, komite audit juga harus membuat pertemuan dengan pihak manajemen, internal dan eksternal auditor, agar dapat meningkatkan efektivitasnya.

Seperti yang tertera dalam peraturan Kep-29/PM/2004 bahwa perusahaan wajib melakukan pembentukan komite audit, dengan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Menelaah informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan data keuangan lainnya.
- b) Menelaah ketaatan perusahaan terhadap aturan undang-undang dibidang pasar modal serta aturan undang-undang lain yang memiliki hubungan dengan aktivitas perusahaan.

- c) Menelaah pelaksanaan, pemeriksaan oleh auditor internal.
- d) Membuat laporan untuk komisaris dengan beragam risiko perusahaan dan melaksanakan manajemen risiko yang dibantu oleh direksi.
- e) Menelaah dan melaporkan kepada komisaris bahwa ada pengaduan yang berhubungan dengan emiten.
- f) Menjaga rahasia dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

7. Variabel Kontrol

Berdasarkan penelitian terdahulu ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Diantaran adalah leverage dan ukuran perusahaan. Oleh sebab itu, variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. *Leverage*

Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sartono, 2008). *Leverage* adalah suatu tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan aau dana yang mempunyai beban tetap (hutang dan atau saham istimewa) dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki (Suryani, 2007). Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar cenderung lebih mudah mendapatkan dana yang lebih besar dari perusahaan kecil (Leksmono, 2010). Dana yang besar dapat membantu perusahaan untuk memiliki asset dan sumber daya yang besar pula sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lebih baik yang menyebabkan perusahaan memiliki peluang untuk menghasilkan laba yang lebih maksimal (lee, 2006).

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Dewan Komisaris dengan Kinerja Keuangan Perusahaan.

Menurut Chtourou et al (2001), dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar akan menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resource dependence, keberadaan dewan komisaris ini bertujuan untuk menjamin investor perusahaan dalam menerima return yang cukup atas investasi mereka, jika peran dewan komisaris ini tidak berfungsi dengan benar maka investor tidak akan merasakan bahwa mereka telah mendanai perusahaan (Totok Dewayanto, 2010). Berdasarkan teroy agency semakin banyak jumlah dari dewan komisaris maka semakin banyak juga pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Iqbal Bukhori (2012),

bahwa dewan komisaris memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan, karena semakin banyak personil dari dewan komisaris dapat berakibat pada buruknya kinerja yang dimiliki oleh perusahaan dan konflik yang ada pada perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Widagdo (2012), bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena ukuran dewan komisaris yang besar akan menyebabkan monitoring manajemen semakin baik.

2. Hubungan Dewan Direksi dengan Kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Rizky Arifani (2012), semakin besar jumlah dari dewan direksi atau setiap peningkatan ukuran dan diservitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan dapat juga menjamin ketersediaan sumber daya perusahaan, serta pembagian dari setiap tugas akan semakin jelas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Raharjo (2014), bahwa dewan direksi memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan, karena semakin banyak jumlah dari dewan direksi akan semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hardikasari (2011), menunjukkan hasil bahwa dewan direksi memiliki hubungan negatif dengan kinerja keuangan, karena semakin banyak jumlah dewan direksi maka semakin

banyak pula pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya sehingga juga akan menimbulkan konflik.

3. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Kinerja Keuangan Perusahaan.

Jensen and Meckling (1976), menjelaskan berdasarkan teory agency bahwa terdapat pemisahan antara kepemilikan saham didalam perusahaan yang akan berpotensi pada munculnya biaya agensi yang disebabkan adanya konflik kepentingan antara pihak principal dan agent, owner memiliki dua pilihan antara menaikkan insentif untuk mamksimalkan utilitanya atau menurunkan intensif untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh sebab itu para pemegang saham luar akan berusaha memperbaiki fungsi pengawasannya terhadap perilaku manajemen dalam upaya meminimalisir biaya agensi yang mungkin timbul. Secara teoritis ketika kepemilikan institusional rendah, maka insentif terhadap oportunistik meningkat (Jensen and Meckling, 1976)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Diandono (2012), menunjukkan hasil bahwa, kepemilikan institusional memiliki hubungan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan karena, semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula dorongan untu pengoptimalan nilai organisasi sehingga kinerja juga meningkat. Adanya kepemilikan institusional didalam perusahaan juga mendorong peningkatan

pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja perusahaan serta dapat menghambat perilaku *opportunistic* manajer.

4. Hubungan Komite Audit dengan Kinerja Keuangan Perusahaan.

Menurut Nurhasanah dan Sri (2017), dengan menjalankan fungsi pengawasan dan penilaian komite audit dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang besar mampu berpengaruh terhadap jalannya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Adanya komite audit akan memberikan pengawasan kepada perusahaan serta menjamin pengelolaan perusahaan yang dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifani (2013), menunjukkan hasil bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, semakin banyaknya jumlah dari komite audit maka pengawasan yang dilakukan akan baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen dalam memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan, sehingga kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian yang terkait dengan *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah dilakukan sebelumnya dengan berbagai variabel independen yang mempengaruhinya. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015), Sunarwan (2015), Hermiyetti dan Katlanis (2017), Gunawan (2016), Dewi

(2016), dan Nurian Orazalin, Monowar Mahmood, Keuan Jung Lee (2016) yang menguji pengaruh tata kelola perusahaan atas kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Dari penelitian-penelitian tersebut, ditemukan hasil yang berbeda-beda dari tiap pengaruh variabel terhadap kinerja keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini beragam, mulai dari ukuran dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, yang digunakan oleh Melia dan Yulius (2015), Sunarwan (2015), Hermiyetti dan Katlanis (2017), Gunawan (2016), Dewi (2016), dan Nurian Orazalin, Monowar Mahmood, Keuan Jung Lee (2016). Sedangkan variabel lain yaitu dewan pengawas syariah yang digunakan oleh Sunarwan (2015), study kasus pada perusahaan Bank Umum Syariah dengan hasil penelitian yaitu dewan pengawas syariah berhubungan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Melia dan Yulius (2015) meneliti hubungan antara *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan. Variable bebas yang digunakan yaitu Dewan komisaris dan juga kepemilikan manajerial. Kinerja perusahaan diukur menggunakan *Return on Asset* (ROA) sebagai variabel terikat. Hasilnya yaitu dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap ROA.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti serta katlanis (2017) di perusahaan manufaktur yang ada di BEI menggunakan variabel kepemilikan manajerial, institusional, asing, dan komite audit menunjukkan hasil yaitu komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

keuangan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Gunawan (2016) yang melakukan penelitian pada perusahaan LQ 45 menggunakan variabel dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit, hasilnya yaitu jumlah komite audit memiliki hubungan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil lain ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) yang meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan *leverage* dengan hasil yaitu komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba dan memiliki dampak pada kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 7 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurian Orazalin, Monowar Mahmood, Keuan Jung Lee (2016)	Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Ukuran Dewan), ROA, ROE	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE.
2	Eko Sunarwan (2016)	<i>Corporate Governance</i> (Dewan direksi, Dewan komisaris, dewan pengawas syariah)	Variabel dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

- 3 Atiqa Rehman *Managerial Ownership, Board Size, Board independence, firm performance* *Negative Assosiation* (ROA, ROE, Tobin's Q) dkk (2013)
 - 4 Shafie Mohamed *Board size, Board Independence, firm performance* *Weak negative correlation* (ROA, ROE, ROCE, MTBV) Zabri dkk, (2015)
 - 5 Maria Fransisca Indikator Corporate Secara simultan indikator GCG Widyati (2013) Governance (Dewan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, kepemilikan Institusional) , dan kinerja keuangan.
 - 6 Yuda Adestian *Corporate Governance* Variabel Dewan direksi tidak memiliki (2015) (Dewan komisaris, berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. dewan direksi, komite audit dan ukuran perusahaan) terhadap kinerja perusahaan.
 - 7 Jaya Laksana Indikator dari Corporate variabel jumlah direksi memiliki (2015) Governance (Dewan berpengaruh positif atas kinerja direksi, dewan keuangan. komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional), dan kinerja keuangan.
-

E. Kerangka Konseptual

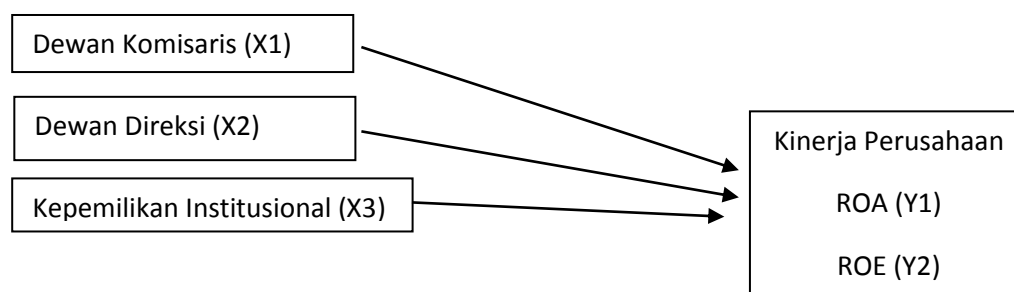
Kinerja perusahaan merupakan penentuan yang dapat mengukur tingkat keberhasilan pada suatu perusahaan dalam menghasilkan profit yang kemudian diinformasikan dalam bentuk laporan keuangan tahunan oleh pihak manajemen kepada pihak *stakeholder*-nya. Pengukuran kinerja pada penelitian ini yaitu menggunakan rasio profitabilitas ROA dan ROE dimana ROA digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengembalian terhadap total asset, sedangkan ROE digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pengembalian terhadap equitas.

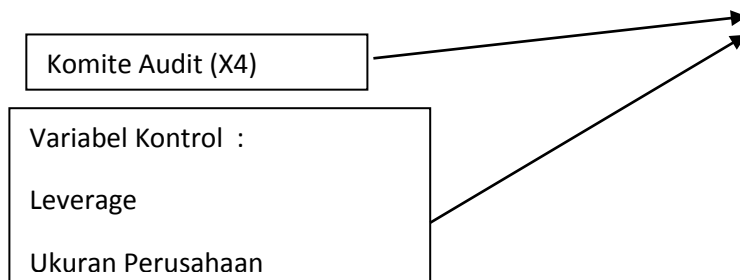
Corporate Governance merupakan sistem yang memberikan arahan dan pengendalian kepada perusahaan agar pihak manajemen (agent) bertindak sesuai keinginan *stakeholder*-nya serta *corporate governance* juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan tersebut. Indikator corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing.

Pertama, jumlah dewan komisaris yang besar akan menyebabkan monitoring manajemen semakin baik, kemudian perusahaan juga akan lebih diawasi serta dapat meminimalisir kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Kedua, jumlah dewan direksi yang besar didalam suatu perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena akan

semakin jelas pembagian tugas dari masing-masing anggota dan semakin banyak jumlah dewan direksi dalam perusahaan juga akan membuat hubungan dengan pihak luar perusahaan akan menjadi lebih baik pula. Ketiga, semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar dorongan untuk pengoptimalan nilai organisasi sehingga kinerja perusahaan juga meningkat. Keempat, jumlah komite audit yang besar didalam suatu perusahaan maka pengawasan yang dilakukan juga semakin baik dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi data yang berkaitan dengan keuangan sehingga kinerja perusahaan juga meningkat. Kerangka konseptual disini bermaksud untuk mengungkapkan, menguji serta menganalisis keterkaitan antar variabel yang diteliti yaitu, jumlah Komisaris, jumlah Direksi, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit selaku variabel independen dan profitabilitas ROA dan ROE sebagai variabel dependen.

Ditinjau dari penelitian yang terdahulu yang telah diuarikan, jadi kerangka konseptual dari penelitian ini adalah ada indikator dalam perusahaan perbankan yaitu dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit yang memiliki pengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja keuangan pada perusahaan perbankan Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :





Gambar 1 Kerangka Konseptual

F. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan teori agensi, masalah keagenan timbul karena banyaknya pihak-pihak didalam perusahaan yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Permasalahan keagenan (*agency problem*) didalam manajemen sebagai wewenang dan kebijaksanaan agent untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, tidak lagi berjalan dengan sebagaimana mestinya karena adanya kepentingan individu dari pihak agent tersebut sehingga upaya peningkatan kinerja perusahaan tidak lagi mencerminkan kinerja agent yang sebenarnya.

Sedangkan berdasarkan teori *stakeholder* keberhasilan usaha perusahaan ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan yang berhasil dalam menjalin hubungan dengan para *stakeholder*-nya. Kesuksesan suatu perusahaan sangat tergantung pada kemampuan pihak manajemen perusahaan dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dari para *stakeholder*-nya atau pemangku kepentingan perusahaan. Sehingga pihak-pihak yang ada didalam perusahaan memiliki peran penting dalam peningkatan kinerja perusahaan. Maka dari itu,

besar atau kecilnya jumlah pihak-pihak yang berkepentingan didalam perusahaan tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dilihat dari kajian teori serta penelitian terdahulu, jadi dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

H₃ : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

H₄ : Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Ukuran kinerja perusahaan yang baik diawali dengan kepercayaan dari investor terhadap suatu perusahaan bahwa dana yang di investasikan berada dalam kondisi yang aman. Sistem Corporate Governance dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa akan memperoleh pengembalian yang baik atas dana yang telah di investasikan. Jika Corporate Governance tidak diterapkan atau tidak berfungsi dengan baik pada suatu perusahaan, maka hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan investor, serta dapat menyebabkan kinerja perusahaan yang kurang baik. Dalam penelitian ini indikator dari *Corporate Governance* yang digunakan adalah Dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan yang di ukur menggunakan ROA dan ROE sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen yaitu variabel Dewan komisaris, Dewan direksi, Kepemilikan institusional dan Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA dan ROE) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2010-2019. Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. Dewan komisaris (DK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur menggunakan ROA dan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur menggunakan ROE.
2. Dewan direksi (DD) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan ROA. Selanjutnya Dewan direksi (DD) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur menggunakan ROE.
3. Kepemilikan institusional (KPI) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur menggunakan ROA. Selanjutnya kepemilikan institusional juga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROE.
4. Komite audit (KA) memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang di ukur menggunakan ROA. Selanjutnya komite audit juga memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROE.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat lebih fokus lagi dalam memikirkan masalah corporate governance terutama indikator-indikator yang terkait dengan dewan komisaris, dewan direksi dan kepemilikan institusional agar dapat mendorong terciptanya kinerja keuangan perusahaan. Ketiga indikator ini memiliki kontribusi besar terhadap perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja manajemen dan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
2. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi di suatu perusahaan perbankan. Alangkah baiknya investor mempertimbangkan aspek-aspek ketika melakukan investasi terutama dalam menerapkan dan melaksanakan *Good Corporate Governance* pada perusahaan perbankan karena dengan terlaksananya GCG maka hak investor akan dilindungi. Beberapa indikator yang harus diperhatikan oleh investor yaitu, dewan komisaris, dewan direksi dan

kepemilikan institusional, karena ketiga indikator ini memiliki kontribusi yang lebih terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, maka diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut yang juga berkaitan dengan kinerja perusahaan. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang serupa dengan sektor yang berbeda dan sampel yang lebih banyak, sehingga dapat memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifani, Rizky. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 1. No. 2. Hal. 1-17.
- Bank Indonesia. (2006). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Bukhori, Iqbal. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI 2010). *Diponegoro Journal Of Accounting*.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard. (2001). Corporate Governance and Earning Management. *Universitas Sfax, Universite Laval-Cole De Comptabilite dan Free University of Bozen-Bolzano, Fakultas Ekonomi dan Manajemen*, Hal. 35, 29 Juni 2001
- Darwia, H. (2009). Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No.3 September 2009, 418-430.
- FCGI. (2002). *Corporate Governance, Forum For Corporate Governance in Indonesia Jakarta*.
- Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multikolineritas dengan SPSS. Semarang: *Badan Penerbit UNIDID*.
- Handayani, Susi. (2013). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan BUMN (Persero) Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol: 4(2) : 183-198.
- Herawaty. V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating dari Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vil. 10, No. 2, November 2008, 97-108.
- Jensen, M. And Meckling, W. (1976). Theory oh the firm : Managerial Behavior, Agency Problem and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.